

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap masyarakat atau publik, karena pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik guna untuk membantu dan melayani kebutuhan dari masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam hal menyediakan pelayanan publik yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya yang terkait pelayanan publik. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, karena harapan masyarakat adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan serta menjunjung tinggi akuntabilitas publik, meskipun sampai sekarang kita merasakan masih sangat sulit untuk menuntut pemerintah daerah memberikan informasi secara luas terkait pertanggungjawaban laporan kinerja.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pemegang amanah (*agent*) untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk mendapatkan dan mengetahui pertanggungjawaban tersebut. Dalam sektor organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberitahuan atas informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Pada sektor pemerintahan audit yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada audit terhadap suatu laporan keuangan namun terdapat audit dengan tujuan tertentu, yaitu dengan melakukan audit atas kinerja pemerintah. Audit Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta

pemeriksaan aspek efektivitas (Susbiyani, 2016) Audit kinerja adalah audit yang dilaksanakan dengan cara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti yang ada untuk menilai kinerja suatu entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas dengan tujuan untuk dapat memperbaiki kinerja entitas yang di audit serta meningkatkan seluruh pelayanan publik dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument sebagai aktivitas kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil kinerja pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat (Ayudya, 2010).

Pengawasan merupakan suatu proses untuk dapat mengetahui pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pengawasan yaitu sebagai usaha agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Untuk dapat mewujudkan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan serta masalah-masalah apa yang terjadi dan dihadapi dalam pelaksanaan rencana tersebut. Berdasarkan penemuan masalah-masalah tersebut dapat diambil kesimpulan dan tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang (Handoko, 2015).

Pengawasan fungsional menurut Wasistiono (2010) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik aparat yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun aparat yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Tujuan pengawasan fungsional menurut Harvianda et al. (2014) yaitu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dalam sektor publik berhubungan dengan transparansi dan pemberian informasi yang komprehensif kepada publik berkaitan dengan pemenuhan hak-hak

publik yang di sediakan oleh pemerintah. Untuk itu akuntabilitas merupakan kewajiban oleh pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta dan mengetahui pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas publik yaitu Inspektorat Kabupaten Pesawaran di duga bermain mata dengan Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan sehingga inspektorat terkesan lambat dan mengulur-ulur waktu dalam proses pemeriksaan yang menjadi pertanyaan warga mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Menurut keterangan warga dan awak media Inspektorat seakan-akan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya ketika media ataupun warga kembali mengkonfirmasi mengenai tim pemeriksaan yang akan turun. Kesimpulannya adalah dengan adanya fenomena tersebut, pimpinan harus mengadakan audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap anggotanya guna menghindari buruknya kinerja. ([Rumah Berita - Informasi Terkini Membangun Negeri](#))

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawati (2019) dengan judul Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendidikan di Jakarta Pusat. Penelitian ini juga menggunakan judul Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik, yang membedakan yaitu tempat penelitiannya. Penelitiannya sebelumnya meneliti pada Dinas Pendidikan di Jakarta Pusat sedangkan penelitian ini meneliti pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

Pengawasan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah

berjalan secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian diatas, pengawasan merupakan suatu cara yang dilakukan guna menjamin suatu kegiatan yang dilaksanakan secara tepat dan apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan tindakan perbaikan. Tujuan dari pengawasan menurut Baswir (2000) adalah untuk melihat dan mengamati apa yang benar-benar terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran”*

## **1.2.Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam laporan ini mengenai Pengaruh Audit Kinerja Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah. Obyek dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Periode yang dilakukan pada periode 2021 dan variabel yang digunakan adalah Audit Kinerja, Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik.

## **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengungkapkan :

1. Apakah audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Inspektorat Kabupaten Pesaawaran?
2. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran?

## **1.4.Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh audit kinerja sektor public terhadap akuntabilitas publik pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian pengaruh audit kinerja dan pengawasan terhadap akuntabilitas publik diharapkan dapat memberikan Manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain :

#### **1.5.1. Bagi Akademisi dan pembaca**

Memberikan pengetahuan tentang masalah audit kinerja dan pengawasan terhadap akuntabilitas publik dan dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang audit kinerja dan pengawasan.

#### **1.5.2. Bagi Organisasi Publik**

Menjadi bahan pertimbangan, pemikiran dan saran yang bermanfaat bagi organisasi publik.

#### **1.5.3. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh audit kinerja dan pengawasan terhadap akuntabilitas publik, serta menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran jelas tentang susunan penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran keseluruhan bab.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh dan saran berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan bahan-bahan yang dijadikan referensi dalam penelitian skripsi.

## LAMPIRAN

Bagian ini berisi data-data yang dapat mendukung dan memperjelas uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.